



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

Jalan P.Diponegoro Nomor 30 Telephone 4156000  
MEDAN

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA SETDAPROVSU**

NOMOR : 395.1 /PPAKB/III/2014

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SETDAPROVSU  
TAHUN 2014 - 2018**

**KEPALA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA SETDAPROVSU**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - b. Bahwa berdsarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan suatu Keputusan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu Tahun 2014-2018
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan pembetunkan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Negara Republik Indonesia 4124);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
9. Peraturan pemerintahan RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 nomor 19);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SETDAPROVSU 2014 - 2018;
- PERTAMA : Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana SetdaprovSU untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana SetdaprovSU 2014-2018 dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 19 Maret 2014

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
Ub.

KEPALA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



Drg. IIS FAIZAH HANUM. M. Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660706 199203 2 006

Tembusan :

Bapak Sekretaris Daerah Provinsi

Cq. Bapak Asisten Kesejahteraan Sosial, sebagai laporan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA SETDAPROVSU**  
**PERIODE TAHUN 2014 - 2018**

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA 2	KONDISI AWAL TAHUN 2013 3	TARGET TAHUNAN					SUMBER DATA 9
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	
Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ditingkat provinsi dan kab/kota	- Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1 perda 4 Pergubsu, 6 MoU 6 Perjanjian	1 kebijakan, 1 MoU	1 kebijakan, 1 MoU	1 kebijakan 1 MoU	1 kebijakan, 1 MoU	1 kebijakan, 1 MoU	Laporan Kegiatan Biro PPAKB
	- Jumlah layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi	314 korban	50 korban	60 korban	70 korban	80 korban	90 korban	Laporan Kegiatan Biro PPAKB
	- Jumlah Desa /Kelurahan Perempuan Indonesia Maju Mandiri ( Model Desa Prima)	21 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	Laporan Kegiatan Biro PPAKB
	- Jumlah kerjasama/kemitraan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota	- Perjanjian kerjasama dengan : 18 Kab/Kota 28 TP PKK 11 Ormas  - Pembentukan 17 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 2 Kab/Kota 1 Ormas  - Pembentukan 3 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 5 Kab/Kota  - Pembentukan 3 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 5 Kab/Kota  - Pembentukan 3 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 8 Kab/Kota  - Pembentukan 3 P2TP2A	- Perjanjian kerjasama dengan : 8 Kab/Kota  - Pembentukan 3 P2TP2A	Laporan Kegiatan Biro PPAKB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL TAHUN 2013	TARGET TAHUNAN					SUMBER DATA
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.	- Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota	1 Perda, 23 Mou Kab/Kota, 24 Forum Anak	3 Pergub, 3 Mou, 3 Forum anak	1 Pergub, 3 Mou, 3 Forum Anak	1 Pergub, 3 Mou, 1 Forum Anak	1 Pergub, 1 Mou, 1 Forum Anak	1 Pergub	Laporan Kegiatan Biro PPAKB
	- Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang perlindungan anak di provinsi dan kab/kota		- Kerjasama / Kemitraan : 1 ki BNN 1 ki HIMPSI - Tim Gugus Tugas	- Kerjasama / Kemitraan : 1 ki BNN 2 ki LSM - Tim Gugus Tugas	- Kerjasama / Kemitraan : 1 ki BNN 1 ki LSM - Tim Gugus Tugas	- Kerjasama / Kemitraan : 1 ki BNN 2 ki LSM - Tim Gugus Tugas	- Kerjasama / Kemitraan : 1 ki BNN 2 ki LSM - Tim Gugus Tugas	Laporan Kegiatan Biro PPAKB
Penguatannya sistem dan mekanisme kelambagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara	- Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG dan PUHA	3 Sekretariat PPRG	1 Program Kerja, 10 Sekretariat PPRG	1 Pergub, 1 Program Kerja, 3 Mou kab/kota, 10 Sekretariat PPRG	2 Program Kerja, 3 Mou kab/kota, 10 Sekretariat PPRG	2 Program Kerja, 3 Mou kab/kota	1 Program Kerja, 3 Mou kab/kota, 1 Profil Anak	Laporan Kegiatan Biro PPAKB
	- Jumlah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yg diperoleh di Provinsi Sumatera Utara melalui evaluasi pelaksanaan PUG tingkat Provinsi	4 Penghargaan : - 3 Kab/Kota - 1 Provinsi	6 Penghargaan : - 5 Kab/Kota - 1 Provinsi	7 Penghargaan : - 6 Kab/Kota - 1 Provinsi	8 Penghargaan : - 7 Kab/Kota - 1 Provinsi	9 Penghargaan : - 8 Kab/Kota - 1 Provinsi	10 Penghargaan : - 9 Kab/Kota - 1 Provinsi	Laporan Kegiatan Biro PPAKB



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL TAHUN 2013	TARGET TAHUNAN					SUMBER DATA
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat.	- Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk, dan Kelompok UPPKS yang mengikuti Hari Keluarga Nasional	28 PPKS, 6 kelompok UPPKS Kab/Kota	2 PPKS, 3 kelompok UPPKS kab/kota	2 PPKS, 3 kelompok UPPKS kab/kota	1 PPKS, 4 kelompok UPPKS kab/kota	2 Jaringan kerjasama, 4 kelompok UPPKS kab/kota	2 Jaringan kerjasama, 5 kelompok UPPKS kab/kota	Laporan Kegiatan Biro PPAKB
	- Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang kualitas kelembagaan kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi serta pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di provinsi dan kab/kota	- 10 Kelompok GSI Kab/Kota - 6 Kerjasama / Kemitraan	- 2 Kelompok GSI Kab/Kota - 2 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 3 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 4 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 4 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 4 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA	- 3 Kelompok GSI Kab/Kota - 4 kab/kota, HIV/AIDS, NAPZA

Ditetapkan di : Medan  
 Pada tanggal : 19 Maret 2014

**a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**Ub.**  
**KEPALA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**



Drg. IIS FAIZAH HANUM.M.Kes  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19660706 199203 2 006